

KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA PALU



Percepatan Pertumbuhan Wilayah

A. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan mampu memahami **Pola dan Faktor Interaksi Desa-Kota**
2. Setelah Kegiatan Pembelajaran Ini Kalian Diharapkan Mampu Memahami Usaha Pemerataan Pembangunan Di Desa Kota

B. Uraian Materi

B. POLA DAN FAKTOR INTERAKSI DESA-KOTA

1. Faktor-faktor yang mendasari interaksi desa – kota

Gravitasi

Istilah gravitasi lebih dikenal setelah lahirnya Hukum Gravitasi Newton yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap benda mempunyai kekuatan menarik terhadap benda lain
- b. Di antara dua benda terjadi proses saling tarik-menarik
- c. Besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.

Hubungan antara Hukum Gravitasi Newton dengan interaksi desa – kota, adalah sebagai berikut :

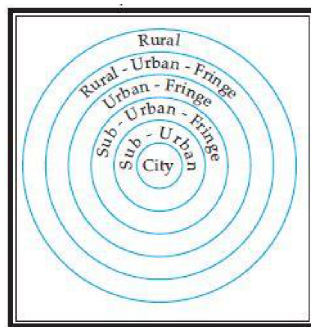
- a. Proses interaksi desa – kota terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik.
- b. Kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa karena alasan berikut:
 - 1) Di kota terdapat beragam pusat daerah kegiatan dan aneka ragam lapangan kerja.
 - 2) Kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaharuan untuk hal-hal baru.
- c. Desa mempunya kekuatan menarik terhadap kota karena alasan berikut:

- 1) Desa mempunyai banyak sumberdaya alam
 - 2) Desa sebagai lumbung serta memberi aneka bahan pangan, bahan sandang, bahan perumahan, dan aneka bahan mentah industri.
 - 3) Desa sebagai pusat tenaga kerja.
 - 4) Desa mempunyai keanekaragaman sumberdaya lingkungan dan panorama alam.
- d. Besar kecilnya kekuatan tarik-menarik antara kota dan desa tergantung pada tinggi-rendahnya potensi fisik-nonfisik kota dan desa tersebut serta tergantung ada atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi penghubung kota dan desa.

Konsep model gravitasi ini didasarkan atas pernyataan bahwa jika ukuran salah satu atau kedua wilayah bertambah, maka pengaruh yang terjadi di antara kedua kota tersebut juga akan bertambah. Semakin jauh jarak antara kedua wilayah, maka akan semakin berkurang juga pengaruh yang terjadi di antara keduanya.

2. Zona Interaksi Desa – Kota

Kekuatan hubungan suatu wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan biasanya sesuai dengan jarak ke pusat kota dan membentuk wilayah tertentu. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka semakin lemah interaksinya dengan pusat kota tersebut. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, di mulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa.



Keterangan:

1. City = kota
2. Suburban = sub daerah perkotaan
3. Suburban fringe = jalur tepi subdaerah
4. Urbanfringe = jalur tepi daerah perkotaan paling luar
5. Rural urban fringe = jalur batas desa-kota
6. Rural = pedesaan

Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto (1986:66) dijelaskan sebagai berikut:

1. City, diartikan sebagai pusat kota
2. Suburban (sub daerah perkotaan), suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju.
3. Suburban Fringe (jalur tepi sub wilayah perkotaan), suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa.
4. Urban Fringe (jalur tepi wilayah perkotaan paling luar) yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota.
5. Rural Urban Fringe (jalur batas desa dan kota), merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian.

6. *Rural* (wilayah desa), wilayah yang masih menitikberatkan pada kegiatan pertanian.

Zona suburban, suburban fringe, urban fringe, dan rural urban fringe merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan moder, sehingga dapat disebut perkotaan jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya jalur-jalur zona interaksi desa dan kita tidak selalu konsentris

Manfaat Interaksi Desa-Kota bagi Perkotaan :

- a. Terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan mentah/bahan baku industri.
- b. Terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan.
- d. Tersedianya tempat pemasaran hasil industri.



Gambar 1 : sayur dan buah merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat perkotaan yang di dapat dari pedesaan.

Manfaat Interaksi Desa-Kota bagi Pedesaan :

- a. Terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa.
- b. Masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan.
- c. Membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian.



Gambar 2 : internet masuk kampung merupakan bagian dari modernisasi teknologi di pedesaan.

1. Intervening Opportunity (kesempatan untuk berintervensi)

Adalah adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antarwilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi, semakin besar intervening opportunity, semakin kecil arus komoditas.

2. Spatial Transfer Ability (kemudahan pemindahan dalam ruang)



Gambar 3 : jalan trans papua diharapkan mampu meningkatkan Spasial Transfer Ability antar daerah di Pulau Papua.

Kemudahan pemindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia maupun informasi. Proses pemindahan dari kota ke desa atau sebaliknya dipengaruhi antara lain :

- a. Jarak mutlak maupun jarak relatif antarwilayah
- b. Biaya transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain
- c. Kelancaran transportasi antarwilayah

Jadi, semakin mudah transferabilitas, semakin besar arus komoditas. Suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antardua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan maupun permasalahan baru

3. Wujud Interaksi Antarkota Atau Antardesa B. POLA DAN FAKTOR INTERAKSI DESA-KOTA

1. Faktor-faktor yang mendasari interaksi desa – kota

Gravitasi

Istilah gravitasi lebih dikenal setelah lahirnya Hukum Gravitasi Newton yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap benda mempunyai kekuatan menarik terhadap benda lain
- b. Di antara dua benda terjadi proses saling tarik-menarik
- c. Besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.

Hubungan antara Hukum Gravitasi Newton dengan interaksi desa – kota, adalah sebagai berikut :

- a. Proses interaksi desa – kota terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik.
- b. Kota mempunya kekuatan menarik terhadap desa karena alasan berikut:
 - 1) Di kota terdapat beragam pusat daerah kegiatan dan aneka ragam lapangan kerja.
 - 2) Kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaharuan untuk hal-hal baru.

c. Desa mempunyai kekuatan menarik terhadap kota karena alasan berikut:

- 1) Desa mempunyai banyak sumberdaya alam
 - 2) Desa sebagai lumbung serta memberi aneka bahan pangan, bahan sandang, bahan perumahan, dan aneka bahan mentah industri.
 - 3) Desa sebagai pusat tenaga kerja,.
 - 4) Desa mempunyai keanekaragaman sumberdaya lingkungan dan panorama alam.
- d. Besar kecilnya kekuatan tarik-menarik antara kota dan desa tergantung pada tinggi-rendahnya potensi fisik-nonfisik kota dan desa tersebut serta tergantung ada atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi penghubung kota dan desa.

Konsep model gravitasi ini didasarkan atas pernyataan bahwa jika ukuran salah satu atau kedua wilayah bertambah, maka pengaruh yang terjadi di antara kedua kota tersebut juga akan bertambah. Semakin jauh jarak antara kedua wilayah, maka akan semakin berkurang juga pengaruh yang terjadi di antara keduanya.

2. Zona Interaksi Desa – Kota

Kekuatan hubungan suatu wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan biasanya sesuai dengan jarak ke pusat kota dan membentuk wilayah tertentu. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka semakin lemah interaksinya dengan pusat kota tersebut. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, di mulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa.



Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto (1986:66) dijelaskan sebagai berikut:

1. City, diartikan sebagai pusat kota
2. Suburban (sub daerah perkotaan), suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para pengalaju.
3. Suburban Fringe (jalur tepi sub wilayah perkotaan), suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa.
4. Urban Fringe (jalur tepi wilayah perkotaan paling luar) yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota.
5. Rural Urban Fringe (jalur batas desa dan kota), merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola

penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian.

6. Rural (wilayah desa), wilayah yang masih menitikberatkan pada kegiatan pertanian.

Zona suburban, suburban fringe, urban fringe, dan rural urban fringe merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan moder, sehingga dapat disebut perkotaan

jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya jalur-jalur zona interaksi desa dan kota tidak selalu konsentris

Manfaat Interaksi Desa-Kota bagi Perkotaan :

- a. Terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan mentah/bahan baku industri.
- b. Terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan.
- d. Tersedianya tempat pemasaran hasil industri.



Gambar 1 : sayur dan buah merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat perkotaan yang di dapat dari pedesaan.

Manfaat Interaksi Desa-Kota bagi Pedesaan :

- a. Terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa.
- b. Masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan.
- c. Membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian.



Gambar 2 : internet masuk kampung merupakan bagian dari modernisasi teknologi di pedesaan.

1. Intervening Opportunity (kesempatan untuk berintervensi)

Adalah adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antarwilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi, semakin besar intervening opportunity, semakin kecil arus komoditas.

2. Spatial Transfer Ability (kemudahan pemindahan dalam ruang)



Gambar 3 : jalan trans papua diharapkan mampu meningkatkan Spasial Transfer Ability antar daerah di Pulau Papua.

Kemudahan pemindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia maupun informasi. Proses pemindahan dari kota ke desa atau sebaliknya dipengaruhi antara lain :

- a. Jarak mutlak maupun jarak relatif antarwilayah
- b. Biaya transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain
- c. Kelancaran transportasi antarwilayah

Jadi, semakin mudah transferabilitas, semakin besar arus komoditas. Suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antardua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan maupun permasalahan baru

3. Wujud Interaksi Antarkota Atau Antardesa

Interaksi wilayah dapat terjadi antara desa dan desa, kota dan desa, kota dan kota, daerah industri dan daerah pemasaran dsb. Dalam hubungan timbal balik ini terdapat proses :

1. Pegerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya seperti pemindahan hasil pertanian, produk industri dan barang tambang.
2. Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa.
3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi.

Interaksi antara desa - kota melahirkan suatu perkembangan baru bagi desa maupun bagi kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki desa maupun kota, dan adanya persamaan kepentingan.

Interaksi antar wilayah dapat dilihat dari dua wujud yaitu dalam wujud fisik dan dalam wujud sosial. Beberapa wujud interaksi yang bersifat fisik adalah sebagai berikut:

a. Perubahan penggunaan lahan. Misalnya, daerah permukiman berubah menjadi daerah pusat pertokoan.

b. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Misalnya, gedung perkantoran, jalan, pertokoan, sekolah dan perumahan.

Interaksi wilayah dapat terjadi antara desa dan desa, kota dan desa, kota dan kota, daerah industri dan daerah pemasaran dsb. Dalam hubungan timbal balik ini terdapat proses :

1. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya seperti pemindahan hasil pertanian, produk industri dan barang tambang.
2. Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa.
3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi.

Interaksi antara desa - kota melahirkan suatu perkembangan baru bagi desa maupun bagi kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki desa maupun kota, dan adanya persamaan kepentingan.

Interaksi antar wilayah dapat dilihat dari dua wujud yaitu dalam wujud fisik dan dalam wujud sosial. Beberapa wujud interaksi yang bersifat fisik adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan penggunaan lahan. Misalnya, daerah permukiman berubah menjadi daerah pusat pertokoan.
- b. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Misalnya, gedung perkantoran, jalan, pertokoan, sekolah dan perumahan.

C. USAHA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOTA

1. Usaha Pemerataan Pembangunan Desa

a. Masalah yang berkaitan dengan proses pembangunan pedesaan

Masalah di desa yang berkaitan dengan pembangunan dapat dikategorikan dalam beberapa masalah. Masalah ini antara lain adalah keadaan masyarakat, pemerintah, dan kondisi geografis. Beberapa masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat desa meliputi sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa
- 2) Tingginya tingkat kematian penduduk desa
- 3) Kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan
- 4) Rendahnya tingkat pendapatan penduduk desa
- 5) Rendahnya tingkat ketrampilan kerja penduduk desa

Beberapa masalah mengenai pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya koordinasi antar lembaga yang ada di pedesaan dalam melaksanakan pembangunan
- 2) Masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum berfungsi sebagaimana mestinya
- 3) Pola penggunaan dan penguasaan tanah belum mencerminkan pemerataan pendapatan

- 4) Kurang koordinasinya lembaga pemerintah desa dengan lembaga di atas nya atau lembaga di luar lembaga pemerintahan desa

Beberapa masalah pada kondisi geografis desa antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya prasarana yang menyebabkan desa tidak dapat berkembang dengan baik
- 2) Jumlah penduduk dengan lahan pertanian tidak seimbang, yaitu banyak penduduk yang menempati wilayah pertanian desa yang relatif sempit
- 3) Jumlah penduduk yang jarang dan terpencar – pencar sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja di desa.

b. Pengertian program pembangunan desa

Program pembangunan desa merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperhatikan kendala yang ada. **Menurut UU nomor 6 Tahun 2014, Program pembangunan desa ini sesuai dengan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).** Dalam hal ini peran pemerintah hanyalah memberikan bantuan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan. Maksudnya adalah agar masyarakat dapat meningkatkan usaha swadaya dan gotong royong serta menumbuhkembangkan desa menuju desa swasembada. Pembangunan desa hendaknya dilakukan secara dinamis, berkelanjutan, menyeluruh, terpadu, dan serasi sehingga akan tercapai sasaran yang tepat.

c. Prinsip – prinsip pembangunan desa

Prinsip – prinsip pembangunan desa disusun berdasarkan pokok – pokok kebijakan sebagai berikut ini:

- a. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif
- c. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada
- d. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- e. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat

d. Sistem kerja pembangunan desa

Agar kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat mencapai sasaran, maka diperlukan sistem kerja dan mekanisme kerja yang baik. Untuk keperluan itu, maka dibentuklah lembaga – lembaga pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tingkat desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa
- c. Unit daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan.



Sumber :

<http://www.telukpanji3.co.id/wp-content/uploads/2016/08/default-banner-2.jpg>

Berikut ini adalah koordinasi pembangunan tingkat desa:

- a. Kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana desa seperti jalan, serta hal – hal yang berhubungan dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) dilakukan melalui LKMD dengan swadaya dan gotong royong masyarakat.



Sumber: <http://www.p2kp.org/warta/files/sumbar-majas-pkp1.jpg>

- b. Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan penduduk, pengembangan sosial budaya, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan masyarakat dikoordinasi oleh LKMD.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja kepala desa dikoordinasi oleh BPD.
- d. Kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi desa, seperti pertanian, pengembangan industri, dan kerajinan rakyat terkoordinasi melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa ini memberikan pelayanan dalam bidang pemodalan, bimbingan teknis, dan pemasaran kepada masyarakat desa.



Sumber:

https://i0.wp.com/www.pipnews.co.id/wp-content/uploads/2017/03/03_01_17_RAT-KUD.jpg?resize=514%2C314

e. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa/ kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil – hasil pembangunan kepada masyarakat. Berikut ini adalah usaha – usaha yang bersifat pengembangan oleh LKMD, yaitu:

- a. Latihan ketrampilan dalam pembangunan dan pemugaran perumahan desa
- b. Latihan keterampilan dalam pelaksanaan permukiman penduduk.
- c. Latihan kursus bidang perekonomian desa, tata desa, dan prasarana desa bagi pengurus LKMD
- d. Latihan keterampilan wirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan
- e. Penyuluhan dan peningkatan motivasi anggota masyarakat di desa – desa yang belum berkembang
- f. Penerbitan brosur – brosur penyuluhan
- g. Menggali dan memanfaatkan potensi gotong royong masyarakat desa untuk pembangunan
- h. Sarana komunikasi, baik antara pemerintah dan masyarakat atau antar warga masyarakat.



sumber:

https://isknews.com/wp-content/uploads/2017/04/PhotoGrid_1491979396245_1-823x450.jpg

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga ini memiliki batas masa kerja selama 6 tahun sejak dilaksanakan pelantikan oleh Bupati. Fungsi dan tugas BPD tertera jelas pada pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2016.

BPD memiliki fungsi sebagai berikut ini:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas dari BPD dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut ini:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa
- 7) Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa



Sumber: https://kelurahanklodran.files.wordpress.com/2013/05/bpd_resize.jpg

g. Unit Daerah Kerja pembangunan (UDKP)

Unit Daerah Kerja pembangunan (UDKP) adalah suatu wadah sistem perencanaan, pelaksanaa, pengendalian, dan pengevaluasian pembangunan yang terkoordinasi dan terpadu di suatu wilayah kecamatan. Sistem pelaksanaan UDKW diutamakan untuk daerah perbatasan, kepulauan, daerah padat penduduk, wilayah kecamatan yang tergolong miskin, rawan dan terbelakang serta daerah yang rat – rata kepadatan penduduknya rendah. UDKP harus bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain adalah bekerjasama dengan:

- a. Tenaga kerja Sukarela (TKS)
- b. Bantuan mahasiswa KKN di berbagai wilayah
- c. Temukarya LKMD
- d. Penempatan sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP3)

Usaha – usaha yang dilakukan UDKP dalam pembangunan desa. Usaha – usaha tersebut antara lain adalah:

- 1) Mengkoordinasi berbagai kegiatan pembangunan sektoral, regional, dan swadaya masyarakat desa
- 2) Mengadakan diversifikasi usaha dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan produksi dan pendapatan
- 3) Mengkoordinasi aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat desa dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah
- 4) Menginformasikan data dan permasalahan desa – desa dalam wilayah kecamatan yang hendak diatasi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- 5) Mewujudkan laju pembangunan dan pemerataan hasil – hasilnya bagi seluruh masyarakat desa.

2. Usaha Pemerataan Pembangunan Kota

a. Permasalahan Perkotaan

Kota secara fisik dapat didefinisikan sebagai area yang terdiri atas bangunan-bangunan yang saling berdekatan yang berada di atas tanah atau

dekat dengan tanah, instalasi-instalasi di bawah tanah dan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa. Bangunan merupakan tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Oleh karenanya, bangunan merupakan unsur pertama yang dibangun di kota setelah air dan makanan tersedia.

Kategori utama penggunaan bangunan yang terdiri atas permukiman, komersial, industri, pemerintahan, transportasi merupakan unsur-unsur pembentuk pola penggunaan tanah kota. Selain tersusun atas bangunan seperti kategori di atas, kota juga berisikan struktur atau bangunan yang lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu: jembatan, gardu-gardu listrik, pengilangan minyak, dan berbagai instalasi lain yang tidak lazim disebut sebagai bangunan, karena struktur bangunan tersebut tidak sebagaimana bangunan umumnya dalam hal menutupi tanah yang ada dibawahnya. Struktur-struktur yang bukan berupa bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung. Kota juga tersusun atas jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan tanah. Bangunan gedung di atas baik yang digunakan untuk permukiman, komersil, industri, pemerintahan maupun transportasi akan terhubung dengan jaringan utilitas umum yang ada di bawah tanah seperti jaringan air bersih, kabel telepon, saluran pengolahan limbah, bak-bak penampungan, gorong-gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir (Branch, 1996).

1) Masalah Permukiman

Pada dasarnya kota terdiri dari bangunan tempat tinggal, perkantoran dan perniagaan. Gambaran tentang satu kota selalu berupa susunan bangunan fisik yang berjejer sepanjang jalan ekonomi, gugus perkantoran pemerintahan dan perniagaan, perkampungan atau permukiman warga kota, rumah ibadah dan pertamanan. Seluruh bangunan fisik ini biasanya berkembang lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan penduduk kota, baik pertumbuhan penduduk kota secara alami maupun karena derasnya arus urbanisasi (Marbun, 1994).



Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Selama ini kawasan permukiman baru lebih ditekankan pada aspek fisik bangunannya saja. Sedangkan permukiman lama yang sudah ada tumbuh dan berkembang dengan pesat tanpa terkendali karena kurang adanya tertib dan pengawasan pembangunan. Kedua hal di atas tersebut mengakibatkan semakin menurunnya kualitas permukiman dalam arti (Marbun, 1994):

- a. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi.
- b. Hilangnya taman-taman dan ruang terbuka.
- c. Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor.
- d. Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pertemuan dan olahraga, rekreasi, dan lain-lain.
- e. Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu.

2) Masalah Lingkungan

Laju urbanisasi dan pembangunan kota yang tinggi akan membawa dampak tersendiri bagi lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar kota. Perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan jumlah penduduk membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota. Aktivitas kota dan pertumbuhan penduduk tersebut telah menyita areal taman, tanah kosong, hutan ladang di sekelilingnya untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan, kantor, ataupun tempat berolahraga dan untuk jalan. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya absorpsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya.

Demikian pula dengan perkembangan industri dan teknologi mencemari lingkungan dengan asap knalpot kendaraan bermotor, jelaga dari cerobong pabrik, air buangan pabrik dan segala buangan produk obat-obatan anti hama seperti DDT dan lain-lain. Sampah plastik juga turut menambah permasalahan bagi lingkungan hidup karena tidak hancur lebur dengan tanah seperti sampah daun atau sampah lainnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Akibat dari pembangunan kota dan perkembangan teknologi ini adalah timbulnya pencemaran lingkungan yang berupa (Marbun, 1994):

- a. Pencemaran udara;
- b. Pencemaran air;
- c. Pencemaran tanah;
- d. Kebisingan.



3) Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan kesehatan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat.

Karena perannya yang sangat penting maka pelayanan pendidikan dan kesehatan harus senantiasa ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Todaro dan Smith (2006) mengatakan pada tahun 1950, sebanyak 280 dari setiap 1.000 anak di semua negara berkembang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun. Pada tahun 2002, angka tersebut telah menurun menjadi 120 per 1.000 di negara-negara miskin, dan 37 per 1.000 di negara-negara berpendapatan menengah, sementara negara-negara berpendapatan tinggi berhasil menekan angka tersebut menjadi 7 per 1.000 anak. Demikian pula halnya dengan pendidikan, sejak beberapa dekade terakhir kemampuan baca tulis (literacy) dan pendidikan dasar sudah dinikmati secara meluas oleh sebagian besar orang di negara-negara berkembang. PBB melaporkan bahwa walaupun masih terdapat 857 juta orang berusia di atas 15 tahun yang buta huruf di dunia pada tahun 2000, namun sekarang 80 persen penduduk dunia telah mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan 63 persen pada tahun 1970.

Pertumbuhan sudah barang tentu dapat juga terjadi melalui pembentukan modal konvensional meskipun tenaga buruh yang ada kurang terampil dan kurang pengetahuan. Tetapi laju pertumbuhan tersebut akan sangat terbatas tanpa adanya faktor modal manusia. Karena itu, modal manusia diperlukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pemerintahan yang semakin penting untuk memperkenalkan sistem baru penggunaan lahan dan metode baru pertanian, untuk membangun peralatan baru komunikasi, untuk melaksanakan industrialisasi, dan untuk membangun sistem pendidikan. Dengan kata lain, pembaharuan atau proses perubahan dari masyarakat statis atau tradisional, memerlukan sejumlah besar modal manusia strategis

b. Prinsip Pembangunan Dasar Kota yang Berkelanjutan

Untuk dapat menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, diperlukan lima prinsip dasar, yaitu ekologi, ekonomi, equity (pemerataan), engagement (peran serta), dan energi (Budiharjo, 1996).

1. Equity (Pemerataan)
2. Ekonomi
3. Energi
4. Ekologi
5. Engagement (Peran Serta)

c. Usaha Pemerataan Pembangunan Kota

Pembangunan suatu kota dan wilayah, ditentukan atas empat aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek lingkungan (Widyaningsih, 2001).

Keempat aspek inilah yang dapat dijadikan dasar kriteria terhadap Analysis Hierarchy Process (AHP) strategi pembangunan Kota. Dari keempat aspek ini dapat dijabarkan lagi menjadi sub-sub kriteria, yaitu :

1. Sub kriteria berdasarkan aspek ekonomi terdiri dari :

- a. Pendapatan daerah (PAD), merupakan hal pokok yang diperlukan menuju kemandirian wilayah menyongsong otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk itu daerah harus memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan berinovasi mencari sumber lain.
- b. Pendapatan masyarakat. Daerah yang mandiri dan maju akan diperlihatkan oleh kemakmuran masyarakatnya (social welfare) ditandai dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari saving, investasi dan produktivitas yang tinggi.
- c. Kesempatan kerja. Daerah yang maju akan menarik datangnya tenaga kerja, karena tingkat upah dan kesempatan kerja yang tinggi.

2. Sub kriteria berdasarkan aspek sosial budaya, terdiri dari :

- a. Kelembagaan, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pengelolaan daerah, yaitu struktur kelembagaan yang profesional dan kaya fungsi.
- b. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan.
- c. Kesehatan. Tingkat kesehatan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan.

3. Sub kriteria berdasarkan aspek fisik, terdiri dari :

- a. Tata guna lahan. Pola tata guna lahan meliputi pengaturan penggunaan tanah dan ruang. Kepastian penggunaan tata guna lahan merupakan faktor keteraturan struktur kota baik fisik maupun non-fisik.
- b. Ketersediaan prasarana dan sarana, menjadi faktor penunjang perkembangan daerah. Ini akan menciptakan kelancaran aksesibilitas dan menarik investasi.
- c. Hubungan antar daerah. Keberadaan suatu daerah akan tergantung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, tidak ada daerah yang maju tanpa keterkaitan dengan yang lain. Hubungan komplementer yang saling menguntungkan akan berdampak terhadap kemajuan daerah.